

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berorientasi pada paham demokrasi sehingga sudah seharusnya memiliki daya partisipasi yang tinggi. Dalam perwujudannya, pemilihan umum merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia telah memberikan ruang kebebasan bagi rakyatnya untuk menentukan pilihannya masing-masing. Namun, pada dasarnya golongan putih (golput) masih menjadi musuh terbesar demokrasi itu sendiri. Kehadiran golput ini dapat mengancam keadaan dan kondisi demokrasi di suatu negara dan menurunkan esensi dari demokrasi, seperti halnya di Indonesia yang sejak lama memiliki sejarah yang cukup panjang. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sejak tahun 1955 yang merupakan pemilihan umum pertama secara langsung sejak proklamasi kemerdekaan. Kemudian baru pada tahun 1971 Indonesia mengadakan pemilu secara langsung pertama kali setelah periode Orde Lama dan pemilu secara langsung selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1999 pasca reformasi yang menjadi titik awal pemilu dengan sistem *luber jurdil* setiap lima tahun di mulai pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 akan melaksanakannya lagi pada 14 Februari 2024 mendatang. Namun masyarakat cenderung tidak menggunakan hak suaranya sepenuhnya, bahkan hal ini semakin meningkat setiap kali pelaksanaan pemilu. (Alfarisyi, dkk: 2023).

Partisipasi tidak hanya sebatas menyediakan ruang bagi warga untuk menyuarkan hak-hak mereka selama pemilihan umum; sebaliknya, hal itu

mencakup manifestasi yang lebih luas. Hal Ini mencakup bagaimana mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mengkoordinasikan implementasi kebijakan, mengoptimalkan kesadaran publik tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Partisipasi politik yang meningkat menandakan keterlibatan, pemahaman, dan keterlibatan yang antusias dari masyarakat dalam urusan nasional. Sebaliknya, partisipasi politik yang rendah umumnya menunjukkan kurangnya penghargaan dan minat di antara masyarakat terkait isu kebijakan pemerintah. Tingkat partisipasi publik yang rendah dalam proses pemilihan umum dianggap sebagai masalah serius, memengaruhi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilihan, dan organisasi non-pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memantau tingkat partisipasi politik publik dalam pemilihan parlemen, karena baik tingkat partisipasi yang rendah maupun tinggi merupakan tanda dan indikator penting dari efektivitas proses pemilihan.

Warno (2021) dalam sebuah penelitian yang berjudul *Peran Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilu* menegaskan bahwa proses pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu elemen penting dalam konteks politik negara demokratis, di mana masyarakat memiliki kesempatan langsung untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif. Suara masyarakat dalam pemilu demokratis dianggap sebagai aset berharga karena menentukan arah dan legitimasi proses demokrasi yang berlangsung secara terbuka, luas, bebas, dan rahasia. Menurut Sayuti (2018) dalam *Netralisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu menurut Undang Undang No 7 Tahun*

2017, menyoroti pentingnya pemilu sebagai ritual demokrasi yang seharusnya dijalankan oleh seluruh warga Indonesia. Namun, tetap ada kekhawatiran bahwa pemilu yang akan datang pada tahun 2024 mungkin tidak akan membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh partisipasi pemilih yang rendah, serta berbagai isu politik seperti korupsi di kalangan elit politik dan pejabat negara, serta kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan rakyat. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memasuki era reformasi, pemilu belum sepenuhnya menghasilkan perubahan yang positif dan menginspirasi bagi rakyat.

Kurangnya keterlibatan politik pada dasarnya disebabkan oleh sikap apatis dan praduga terhadap aktivitas politik, di mana masyarakat lebih condong untuk memprioritaskan kegiatan sehari-hari seperti pekerjaan, olahraga, pertemuan sosial, perjalanan, dan lain sebagainya yang dianggap lebih penting daripada terlibat dalam politik. Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik adalah tingkat pendidikan masyarakat: semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk terlibat dalam kegiatan politik. Namun, secara paradoks, hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi politik yang rendah di banyak negara berkembang di mana tingkat literasi masyarakat masih kurang (Putri, 2016).

Di negara-negara yang menerapkan prinsip demokrasi, mengukur partisipasi politik masyarakat selama pemilihan umum menjadi lebih mudah. Tingkat keterlibatan penduduk dapat diukur dengan membandingkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara mereka dengan jumlah total penduduk yang

memiliki hak memilih. Negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang stabil cenderung menunjukkan tingkat partisipasi politik yang stabil dan tidak bergejolak. Oleh karena itu, peningkatan tingkat golongan putih atau abstain dianggap sebagai sinyal negatif terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia, karena menunjukkan bahwa demokrasi tidak berjalan secara optimal (Djuyandi, 2014).

Banyak negara saat ini menghadapi tantangan rendahnya partisipasi politik dari generasi pemilih pemula jika dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Sebagai contoh, di Indonesia, Sodikin, dkk. (2013) mencatat bahwa jumlah non-pemilih (sering disebut sebagai golput) yang terutama berasal dari kalangan muda terus bertambah dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya. Angka tersebut mencapai 10,21% pada Pemilu tahun 1999, yang kemudian bertambah menjadi 23,34% pada Pemilu tahun 2004, dan mencapai 39,10% pada Pemilu tahun 2009.

Sejak dimulainya Era Reformasi, masyarakat Indonesia telah mengalami peningkatan akses terhadap informasi karena jumlah media massa, baik dalam bentuk cetak maupun digital, semakin bertambah. Setelah 32 tahun di bawah pemerintahan rezim Orde Baru, Indonesia mulai memasuki era demokrasi. Dengan adanya kebebasan bersuara dan berpendapat, diharapkan masyarakat Indonesia menjadi lebih teredukasi secara politik dan memiliki lebih banyak opsi. Era Reformasi juga diwarnai dengan munculnya situs berita *online* seperti detik.com, beritanet.com, kompas.com, tempo.co.id, antara.com, dan lainnya, yang memungkinkan berita dan informasi politik tersebar dengan cepat ke seluruh masyarakat tanpa biaya yang besar. Setiap individu mempunyai kesempatan untuk

berkontribusi dalam produksi dan distribusi berita dan informasi. Dengan hadirnya situs jejaring sosial yang baru lahir, masyarakat menjadi lebih mudah dalam berbagi berita dan informasi politik.

Meskipun situasi politik semakin transparan, namun partisipasi politik generasi muda tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bagi sebagian generasi muda, politik sering dinilai sebagai hal yang terlalu formal, bahkan banyak di antara mereka yang enggan membicarakan politik sama sekali. Menurut Loina Perangin-angin (2018), pada Pemilu tahun 2014, sekitar 63% pemilih berasal dari Pulau Jawa, di mana 19,7 juta di antaranya termasuk pemilih pemula dalam rentang usia 17-21 tahun, dan sekitar 57% dari mereka adalah generasi muda yang terampil dalam menggunakan media (*media literacy*). Mereka merupakan bagian dari generasi digital yang akrab dengan media sosial, aktif berpartisipasi dalam ruang publik dengan komentar yang cepat, tajam, terkadang kasar, dan sering bergeser dari satu isu ke isu lain yang menarik perhatian mereka.

Partisipasi politik generasi saat ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan generasi sebelumnya. Sebelumnya, partisipasi politik cenderung bersifat konvensional, seperti melalui aksi demonstrasi dengan turun aksi ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Meskipun tindakan semacam itu masih terjadi, namun jumlahnya cenderung sedikit. Saat ini, partisipasi politik lebih sering dilakukan melalui internet dan media *online*. Menurut EACEA (2012), partisipasi politik generasi muda masa kini tampak bersifat personal, langsung, berfokus pada isu-isu tertentu, dan kurang berhubungan dengan perbedaan sosial.

Media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam tingkat

partisipasi di antara pemilih dan publik, seperti yang disorot oleh Boulianne (2009). Penggunaan internet oleh masyarakat meningkat secara signifikan, dan hal ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam proses politik karena internet menjadi sumber informasi utama. Di Indonesia, generasi muda di perkotaan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, dengan internet memainkan peran sentral dalam partisipasi politik mahasiswa dalam demonstrasi, seperti yang dicatat oleh Woodly (2008). Media *online* memiliki dampak positif yang signifikan dan memfasilitasi penyebaran informasi atau pengetahuan kepada masyarakat, seperti yang disoroti oleh Gil de Zúñiga et al. (2010). Di Indonesia sendiri, penggunaan media sosial telah membuktikan kegigihan dalam aktivisme dan partisipasi politik, seperti yang dikemukakan oleh Ida et al. (2020a).

Sejak kemunculannya, media sosial dimaksudkan sebagai platform bagi penggunaannya untuk memudahkan berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jaringan virtual. Fasilitas media sosial meliputi blog, jaringan sosial, forum, dan dunia visual. Media sosial juga dapat digunakan sebagai bentuk media promosi online di bidang marketing politik di mana orang dapat mengunjungi dan membaca informasi tentang politik dan pembaharuan mengenai masalah politik. Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai bentuk potensial media promosi interaktif untuk mengedukasi pemilih mengenai informasi politik tentang pemilihan, kampanye, dan acara.

Kemajuan teknologi dan perkembangan informasi di Indonesia saat ini berlangsung dengan cepat dan meresap ke hampir semua bidang kehidupan, termasuk dalam ranah sosial politik. Salah satu aspek yang searah dengan

perkembangan teknologi dan informasi ini ialah popularitas media sosial, yang banyak digunakan secara meluas oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian integral dari dinamika sosial politik di Indonesia. Karena itu, penting untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan media sosial sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu sebagai alat interaksi dan sumber informasi. Di Indonesia, sekitar 85% pengguna media sosial terhubung melalui platform sosial media seperti grup Facebook (termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp Messenger), yang merupakan angka terbesar dalam statistik penggunaan media sosial. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada tahun 2017, ada sekitar 65 juta pengguna aktif Facebook setiap hari, dan sekitar 50% dari mereka bergabung dalam grup Facebook. Selain itu, terdapat sekitar 45 juta pengguna aktif Instagram setiap hari, dengan rata-rata jumlah *posting* lebih dari dua kali lipat dari rata-rata global pada tahun 2017.

Pengguna media sosial yang merupakan bagian dari masyarakat, perlu mendapatkan pendidikan tentang etika dan peraturan yang berlaku terhadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Proses validasi informasi media, termasuk media cetak, media elektronik, dan media sosial berbasis internet, harus melibatkan analisis yang cermat dalam mencari informasi dari berbagai sumber. Validasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan informasi yang akurat. Data menunjukkan bahwa pengguna media sosial sebagian besar adalah anak-anak dan remaja, hingga orang dewasa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak negatif

rendahnya tingkat literasi digital sehingga mereka dapat menghindari situasi yang tidak diinginkan.

Instagram adalah salah satu platform media sosial yang saat ini sangat populer dan digunakan oleh beragam kalangan. Instagram merupakan sebuah platform media sosial yang memiliki fitur utama bagi penggunanya untuk berbagi foto dan video secara *online*. Platform ini diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger yang dirilis pertama kali pada Oktober 2010. Di era digital seperti sekarang, Instagram digunakan sebagai alat komunikasi visual yang memungkinkan penggunanya baik sebagai individu atau organisasi untuk melakukan interaksi dengan audiens mereka, mengungkapkan gagasan, dan berbagi pengalaman melalui media visual seperti gambar dan video. Selain itu, Instagram juga memiliki pengaruh dalam memahami perilaku sosial, komunikasi, dan tren dalam masyarakat yang dapat menjadi subjek penelitian di berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, komunikasi, dan studi media.

Dengan kegunaan Instagram yang dapat mengunggah dan berbagi konten dalam bentuk video dan foto, maka tidak jarang Instagram juga digunakan sebagai media komunikasi untuk pendidikan politik. Kandidat politik dan partai politik dapat menggunakan Instagram untuk mempromosikan diri mereka, menyebarkan pesan politik, dan berbagi visi dengan pemilih. Pesan-pesan politik tersebut dapat berupa gambar dari kampanye, video pidato, atau berbagai jenis konten yang mendukung pesan politik mereka. Instagram juga dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang pemilihan umum, seperti tanggal pemilihan, lokasi tempat pemungutan suara, dan persyaratan pemilih. Hal ini dapat membantu

meningkatkan partisipasi pemilih dengan memberikan akses mudah ke informasi yang relevan. Akun-akun yang bertemakan politik pun juga tidak sedikit yang aktif memberikan informasi.

Umumnya akun-akun tersebut membagikan informasi berupa infografis dan cerita yang membantu mengedukasi masyarakat tentang isu-isu politik. Algoritma Instagram pun dapat berkaitan dengan aktivitas penggunanya dan isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini berarti jika ada gerakan politik atau kampanye politik sang kandidat politik dapat mengontrol dan masyarakat memiliki akses informasi yang cepat akan gerakan kampanye tersebut. Politisi dan partai politik dapat menggunakan Instagram untuk menghargai pemilih dan sukarelawan yang mendukung mereka. Hal ini bisa berupa ucapan terima kasih atau pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam proses politik. Selain itu, akun-akun pendidikan politik dapat menggunakan Instagram untuk memberikan informasi tentang sistem politik, proses pemilihan, hak dan kewajiban pemilih, serta isu-isu politik yang relevan. Dengan demikian hal tersebut dapat membantu meningkatkan literasi politik masyarakat. Penting untuk diingat bahwa pendidikan politik di Instagram harus dilakukan dengan cara yang seimbang, berfokus pada informasi yang akurat, dan menghormati beragam pandangan politik. Selain itu, interaksi positif dengan pemilih dan partisipasi aktif dalam diskusi politik adalah kunci keberhasilan dalam menggunakan Instagram sebagai media komunikasi pendidikan politik.

Penggunaan Instagram oleh generasi muda mencerminkan berbagai aspek kehidupan mereka, dari aspek sosial hingga aspirasi karir, hingga aktivisme sosial

dan politik. Instagram adalah alat yang kuat untuk berkomunikasi, berbagi, dan mempengaruhi dunia di sekitar mereka, serta menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Dalam perkembangan isu-isu sosial dan politik di Indonesia hadir akun-akun Instagram yang berperan sebagai *newsite*, *educator*, akun bisnis dan promosi atau akan individu yang dapat bertransisi sebagai *creator*. *@whatisupindonesia* merupakan salah satu akun Instagram yang menyediakan konten isu-isu sosial dan politik dalam bahasa Inggris. Hal ini dilakukan karena tidak sedikit warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di luar negeri dan kurang menguasai Bahasa Indonesia sepenuhnya. Sehingga audiens utama akun ini adalah warga negara Indonesia yang kurang memahami Bahasa Indonesia namun tetap ingin mengetahui isu-isu sosial politik terkini yang terjadi di Indonesia.

Tidak sedikit jumlah remaja Indonesia yang kurang memahami bahasa ibu mereka karena berada di lingkungan yang cenderung berbicara dengan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Contohnya remaja yang bersekolah di sekolah internasional cenderung lebih sering menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari mereka dalam berkomunikasi. Generasi muda yang sudah dikelilingi lingkungan seperti itu relatif lahir dari keluarga yang memiliki tingkatan ekonomi menengah ke atas dan tidak sedikit pula dari mereka yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke luar negeri karena sistem pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, banyak stigma yang lahir akan mereka yang kurang fasih berbahasa Indonesia. Hal ini juga menimbulkan potensi segregasi dalam lingkungan sosial. Kelompok generasi seperti mereka ini dianggap mengabaikan

Indonesia sebagai tanah air mereka karena lebih memilih berada di lingkungan tersebut. Kekurangan akses terhadap konten edukasi berbahasa Inggris pun juga menjadi faktor mereka dianggap ignoran. Secara umum, kelompok mereka memiliki kecerdasan intelektual yang lebih baik dengan akses pendidikan yang maju dibandingkan dengan generasi muda yang pada lingkungan yang biasanya. Dengan kecerdasan intelektual yang dimiliki, mereka terbiasa lebih kritis dalam menanggapi suatu isu, sehingga mereka cenderung berhati-hati dalam beropini.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka fokus utama masalah penelitian ini ialah: Bagaimana pengaruh konten *@whatisupindonesia* di Instagram terhadap pendidikan dan partisipasi politik pengikutnya?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan pengaruh akun *@whatisupindonesia* di platform Instagram, khususnya dalam konteks pendidikan politik yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Mendorong pengikutnya berkontribusi dalam memahami bagaimana konten media sosial, khususnya di platform Instagram, dapat digunakan sebagai alat pendidikan politik. Hal ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang bagaimana pendidikan politik dapat diintegrasikan ke dalam platform media sosial.
2. Membantu memahami peran penting yang dimainkan oleh akun-akun media sosial seperti *@whatisupindonesia* dalam membentuk pemahaman politik dan kesadaran sosial pengikut mereka.
3. Memberikan panduan bagi pengguna media sosial dan pemilik akun yang ingin meningkatkan literasi politik dan kesadaran sosial melalui platform seperti Instagram.
4. Memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan literasi politik dan kesadaran sosial di kalangan audiens yang berbahasa Inggris yang mengikuti akun *@whatisupindonesia* atau serupa.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini maka penulis akan menjabarkan sistematika penulisan:

Bab I : Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini menjelaskan penelitian terhadulu yang yang berkaitan dengan pengaruh media sosial dalam berpolitik, media sosial sebagai alat kampanye, dan pendidikan politik melalu media sosial,

Bab III : Bab ini membahas pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis pengaruh Instagram dalam pendidikan dan partisipasi politik Indonesia terhadap pengguna Instagram yang mengikuti akun *@whatisupindonesia* yang terbiasa berbahasa Inggris.

Bab IV : Bab ini membahas gambaran umum mengenai akun *@whatisupindonesia* yang mencakup latar belakang berdirinya akun tersebut, profil founder, serta konten-konten yang dibagikan.

Bab V : Bab ini menunjukkan hasil data yang telah diolah dan diteliti dari penelitian dikaitkan dengan analisis fenomena yang terjadi berkaitan dengan konten media sosial Instagram *@whatisupindonesia* sebagai penyedia informasi isu politik Indonesia.

Bab VI : Bab ini berisi kesimpulan dan penutup yang berupa hasil analisis dan pengamatan penulis pada pengikut media sosial Instagram *@whatisupindonesia* sebagai penyedia informasi isu politik.

